

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
POLA KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

POLA KLASIFIKASI ARSIP

A. KODE UNIT UTAMA

M.HH	=	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
WMH	=	Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
SEK	=	Sekretariat Jenderal
PPE	=	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
AHU	=	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
PAS	=	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
IMI	=	Direktorat Jenderal Imigrasi
HKI	=	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
HAM	=	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
ITJ	=	Inspektorat Jenderal
PHN	=	Badan Pembinaan Hukum Nasional
PPH	=	Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
SDM	=	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
SAM	=	Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

B. KODE UNIT KERJA

1. SEKRETARIAT JENDERAL (SEK)

SEK.1	=	Biro Perencanaan
SEK.2	=	Biro Kepegawaian
SEK.3	=	Biro Keuangan

- SEK.4 = Biro Perlengkapan
- SEK.5 = Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri
- SEK.6 = Biro Umum
- SEK.7 = Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

2. DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PPE)

- PPE.1 = Setditjen Peraturan Perundang-Undangan
- PPE.2 = Dit. Perancangan Peraturan Perundang-undangan
- PPE.3 = Dit. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
- PPE.4 = Dit. Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama Peraturan Perundang-undangan
- PPE.5 = Dit. Litigasi Perundang-undangan
- PPE.6 = Dit. Fasilitasi Perancangan Peraturan daerah

3. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU)

- AHU.1 = Setditjen Administrasi Hukum Umum
- AHU.2 = Dit. Perdata
- AHU.3 = Dit. Pidana
- AHU.4 = Dit. Tata negara
- AHU.5 = Dit. Hukum Internasional dan Otoritas Pusat
- AHU.6 = Dit. Daktiloskopi

4. DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN (PAS)

- PAS.1 = Setditjen Pemasyarakatan
- PAS.2 = Dit. Bina Keamanan dan Ketertiban
- PAS.3 = Dit. Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
- PAS.4 = Dit. Bina Pengelolaan Basan dan Baran
- PAS.5 = Dit. Informasi dan Komunikasi
- PAS.6 = Dit. Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
- PAS.7 = Dit. Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan

5. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI (IMI)

- IMI.1 = Setditjen Imigrasi
- IMI.2 = Dit. Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian
- IMI.3 = Dit. Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
- IMI.4 = Dit. Intelijen Keimigrasian
- IMI.5 = Dit. Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian
- IMI.6 = Dit. Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian
- IMI.7 = Dit. Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

6. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- HKI.1 = Setditjen Hak Kekayaan Intelektual
- HKI.2 = Dit. Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
- HKI.3 = Dit. Paten
- HKI.4 = Dit. Merek
- HKI.5 = Dit. Kerjasama dan Promosi
- HKI.6 = Dit. Teknologi Informasi
- HKI.7 = Dit. Penyidikan

7. DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA (HAM)

- HAM.1 = Setditjen Hak Asasi Manusia
- HAM.2 = Dit. Pelayanan Komunikasi Masyarakat
- HAM.3 = Dit. Kerjasama Hak Asasi Manusia
- HAM.4 = Dit. Diseminasi Hak Asasi Manusia
- HAM.5 = Dit. Penguatan Hak Asasi Manusia
- HAM.6 = Dit. Informasi Hak Asasi Manusia

8. INSPEKTORAT JENDERAL (ITJ)

- ITJ.1 = Sekretariat Inspektorat Jenderal
- ITJ.2 = Inspektorat Wilayah I

- ITJ.3 = Inspektorat Wilayah II
- ITJ.4 = Inspektorat Wilayah III
- ITJ.5 = Inspektorat Wilayah IV
- ITJ.6 = Inspektorat Wilayah V
- ITJ.7 = Inspektorat Wilayah VI

9. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (PHN)

- PHN.1 = Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
- PHN.2 = Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional
- PHN.3 = Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional
- PHN.4 = Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
- PHN.5 = Pusat Penyuluhan Hukum

10. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA (PPH)

- PPH.1 = Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
- PPH.2 = Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik
- PPH.3 = Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- PPH.4 = Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik
- PPH.5 = Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus

11. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (SDM)

- SDM.1 = Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
- SDM.2 = Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen
- SDM.3 = Pusat Pengembangan Teknis
- SDM.4 = Pusat Pengembangan Fungsional dan Hak Asasi Manusia

SDM.5 = Akademi Ilmu Pemasyarakatan

SDM.6 = Akademi Imigrasi

C. KODE UNIT KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- W.1 Daerah Istimewa Aceh
- W.2 Sumatera Utara
- W.3 Sumatera Barat
- W.4 Riau
- W.5 Jambi
- W.6 Sumatera Selatan
- W.7 Kepulauan Bangka Belitung
- W.8 Bengkulu
- W.9 Lampung
- W.10 Dki Jakarta
- W.11 Jawa Barat
- W.12 Banten
- W.13 Jawa Tengah
- W.14 Daerah Istimewa Yogyakarta
- W.15 Jawa Timur
- W.16 Kalimantan Barat
- W.17 Kalimantan Tengah
- W.18 Kalimantan Timur
- W.19 Kalimantan Selatan
- W.20 Bali
- W.21 Nusa Tenggara Barat
- W.22 Nusa Tenggara Timur
- W.23 Sulawesi Selatan

- W.24 Sulawesi Tengah
- W.25 Sulawesi Tenggara
- W.26 Gorontalo
- W.27 Sulawesi Utara
- W.28 Maluku
- W.29 Maluku Utara
- W.30 Papua
- W.31 Papua Barat
- W.32 Kepulauan Riau
- W.33 Sulawesi Barat

D. KODE MASALAH FASILITATIF

- DL = Pendidikan dan Pelatihan
- HM = Humas dan Kerjasama Luar Negeri
- TI = Teknologi Informasi
- KP = Kepegawaian
- KU = Keuangan
- OT = Organisasi dan Tata Laksana
- PL = Perlengkapan
- PR = Perencanaan
- PW = Pengawasan
- UM = Umum

E. KODE MASALAH SUBSTANTIF

- PP = Peraturan Perundang-undangan
- AH = Administrasi Hukum Umum
- PK = Pemasyarakatan
- GR = Keimigrasian
- HI = Hak Kekayaan Intelektual

- HA = Hak Asasi Manusia
- HN = Pembinaan Hukum Nasional
- LT = Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
- BP = Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

F. MASALAH FASILITATIF

1. DL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DL 01 Perencanaan Pendidikan dan Latihan (DIKLAT)

- 01 01 Kurikulum, Metode, Standar / Mutu dan Pedoman DIKLAT
- 01 02 Program DIKLAT

DL 02 Penyelenggaraan Pendidikan

- 02 01 Perguruan Tinggi
- 02 02 Ikatan Dinas
- 02 03 Kerjasama dengan Instansi non pemerintah

DL 03 Penyelenggaraan Pelatihan

- 03 01 Pra Jabatan
- 03 02 Penjenjangan Struktural
- 03 03 Fungsional
- 03 04 Teknis

DL 04 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

- 04 01 Bimbingan Teknis bidang Fasilitatif
- 04 02 Bimbingan Teknis bidang Substantif

DL 05 Pertemuan Ilmiah dalam dan luar negeri

- 05 01 Seminar
- 05 02 Lokakarya
- 05 03 Diskusi

- 05 04 Simposium
- 05 05 Temu Karya
- 05 06 Bedah buku

- DL 06 Evaluasi dan laporan Penyelenggaraan DIKLAT
 - 06 01 Evaluasi Materi Penyelenggaraan
 - 06 02 Evaluasi Pengajar / Instruktur / Fasilitator
 - 06 03 Evaluasi Peserta dan Alumni
 - 06 04 Evaluasi Sarana dan Prasarana
 - 06 05 Evaluasi Kurikulum, Metode dan Standardisasi
 - 06 06 Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan

2. HM KEHUMASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

- HM 01 Informasi dan Komunikasi
 - 01 01 Unit Utama / Eselon I
 - 01 02 Kantor Wilayah
 - 01 03 Unit Pelaksana Teknis
 - 01 04 Media Massa (cetak, elektronik)
 - 01 05 Sosialisasi dan Diseminasi
- HM 02 Dokumentasi
 - 02 01 Hasil Liputan
 - 02 02 Guntingan berita/kliping
 - 02 03 Analisa Media
- HM 03 Kepustakaan
 - 03 01 Pengumpulan
 - 03 02 Pengadaan
 - 03 03 Pendistribusian

- 03 04 Pemanfaatan/pelayanan
 - 03 05 Pengolahan (inventarisasi, pengklasifikasian)
 - 03 06 Pemeliharaan
- HM 04 Penerbitan
 - 04 01 Redaksi
 - 04 02 Penulis
 - 04 03 Naskah Asli
 - 04 04 Master
 - 04 05 Pencetakan
 - 04 06 Distribusi
- HM 05 Hubungan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
 - 05 01 Lembaga Tinggi Negara
 - 05 02 Lembaga Pemerintah
 - 05 03 Lembaga Swasta/Lembaga Swadaya Masyarakat
 - 05 04 Perguruan Tinggi/Sekolah
- HM 06 Kerjasama Luar Negeri
 - 06 01 Bilateral
 - 06 02 Multilateral
 - 06 03 Lembaga Swasta/*Non Government Organization*
 - 06 04 Organisasi Internasional (UNDP, UNICEF, dll)
- HM 07 Fasilitasi dan Pengaduan Masalah Hukum
 - 07 01 Administrasi Majelis Pengawas Notaris
 - 07 02 Persidangan Notaris
 - 07 03 Pengaduan Masalah Hukum

3. TI TEKNOLOGI INFORMASI

TI 01 Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi

- 01 01 Penyusunan Program Perencanaan Teknologi Informasi
- 01 02 Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi
- 01 03 Pengembangan Aplikasi
- 01 04 Pengembangan Database
- 01 05 Pengembangan Situs Internet, Portal Internet dan Surat Elektronik

TI 02 Implementasi dan Perubahan Sistem Teknologi Informasi

- 02 01 Uji coba infrastruktur Teknologi Informasi
- 02 02 Implementasi Aplikasi
- 02 03 Implementasi Situs Internet, Portal Intranet dan Surat Elektronik

TI 03 Layanan Sistem Teknologi Informasi

- 03 01 Layanan Keluhan Penggunaan perangkat Teknologi Informasi
- 03 02 Tindak lanjut keluhan
- 03 03 Monitoring /pemantauan layanan keluhan

TI 04 Pengelolaan dan Pemeliharaan sistem Teknologi Informasi

- 04 01 Pengelolaan dan pemeliharaan alat pendukung sistem Teknologi Informasi
- 04 02 Pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
- 04 03 Pengelolaan dan pemeliharaan Database
- 04 04 Pengelolaan dan pemeliharaan Aplikasi
- 04 05 Pengelolaan dan pemeliharaan Situs internet, Portal Intranet dan Surat Elektronik

4. KP KEPEGAWAIAN

KP 01 Formasi Pegawai

- 01 01 Inventarisasi Jabatan/Peta Jabatan
- 01 02 Evaluasi Jabatan
- 01 03 Usulan Formasi
- 01 04 Alokasi Formasi

- KP 02 Penerimaan/Pengadaan Pegawai
 - 02 01 Umum
 - 02 02 AKIP dan AIM

- KP 03 Pengangkatan Pegawai
 - 03 01 Pengangkatan CPNS
 - 03 02 Pengangkatan PNS
 - 03 03 Pengangkatan jabatan struktural
 - 03 04 Pengangkatan jabatan fungsional

- KP 04 Mutasi Pegawai
 - 04 01 Alih tugas/diperbantukan/dipekerjakan/pelaksana harian/pelaksana tugas
 - 04 02 Mutasi keluarga (nikah, anak, cerai, dan kematian)
 - 04 03 Kenaikan gaji berkala (KGB)
 - 04 04 Kenaikan pangkat/golongan
 - 04 05 Peninjauan masa kerja

- KP 05 Pembinaan Pegawai
 - 05 01 Ujian dinas, ujian penyesuaian ijasah, dan seleksi diklat
 - 05 02 Penilaian pegawai (DP3, Uji Kelayakan dan Kepatutan)
 - 05 03 Sasaran Kinerja Pegawai
 - 05 04 Pemanggilan dan pemeriksaan pegawai

- KP 06 Hukuman Disiplin
 - 06 01 Tingkat ringan (pernyataan tidak puas, teguran lisan, teguran tertulis)

- 06 02 Tingkat sedang (penundaan KGB, KP dan penurunan gaji)
- 06 03 Tingkat berat (penurunan pangkat, Pembebasan Jabatan, pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat)
- KP 07 Tata Usaha Kepegawaian
 - 07 01 Data pegawai
 - 07 02 Identitas pegawai (Karpeg, Karsu, Karis)
 - 07 03 Izin Kepegawaian (izin belajar, tugas belajar dalam dan luar negeri)
 - 07 04 Keanggotaan Pegawai dalam Organisasi Sosial
 - 07 05 Tanda penghargaan/kehormatan
 - 07 06 Kekayaan (LP2P dan LHKPN)
 - 07 07 Daftar hadir/absensi pegawai
- KP 08 Kesejahteraan Pegawai
 - 08 01 Kesehatan
 - 08 02 Perumahan (TAPERUM, biaya uang muka)
 - 08 03 Taspen
 - 08 04 Cuti
 - 08 05 Uang duka tewas
- KP 09 Pembinaan Jabatan Fungsional
 - 09 01 Jabatan fungsional umum
 - 09 02 Jabatan fungsional tertentu
- KP 10 Pemberhentian pegawai
 - 10 01 Pemberhentian atas permintaan sendiri
 - 10 02 Pemberhentian karena batas usia pensiun
 - 10 03 Pemberhentian karena keuzuran/kondisi jasmani dan rohani

- 10 04 Pemberhentian karena hilang
- 10 05 Pemberhentian sementara
- 10 06 Pemberhentian dari jabatan organik
- 10 07 Pensiun janda/duda dan anak

KP 11 Organisasi Non Kedinasan

- 11 01 KORPRI
- 11 02 Dharma Wanita
- 11 03 Koperasi
- 11 04 Yayasan

5. KU KEUANGAN

KU 01 Pelaksanaan Anggaran

- 01 01 Belanja pegawai
- 01 02 Belanja barang
- 01 03 Belanja modal
- 01 04 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- 01 05 Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA)

KU 02 Penerimaan Negara

- 02 01 Pajak
- 02 02 Bukan pajak

KU 03 Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan

- 03 01 Pedoman dan petunjuk administrasi keuangan
- 03 02 Penyelesaian kerugian negara
- 03 03 Pengelola keuangan

KU 04 Pengujian dokumen SPP dan Penerbitan SPM

- 04 01 Surat Permintaan Pembayaran
- 04 02 Surat Perintah Membayar
- 04 03 Buku kas umum dan buku pembantu

04 04 Belanja perjalanan

KU 05 Akuntansi dan Pelaporan

05 01 Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

05 02 Pengumpulan, pemantauan, evaluasi dan laporan keuangan

05 03 Rekonsiliasi dan data laporan keuangan

6. OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

OT 01 Organisasi

01 01 Struktur organisasi

01 02 Evaluasi kelembagaan

OT 02 Ketatalaksanaan

02 01 Standarisasi sarana kerja

02 02 Sistem, prosedur dan metoda kerja

02 03 Analisa dan Uraian jabatan

OT 03 Instruksi Menteri

7. PL PERLENGKAPAN

PL 01 Analisa Kebutuhan Barang Milik Negara

01 01 Rencana kebutuhan barang tidak bergerak

01 02 Rencana kebutuhan barang bergerak

01 03 Kebutuhan barang persediaan

01 04 Rencana kebutuhan aset tak berwujud

PL 02 Pengadaan Barang Milik Negara

02 01 Barang tidak bergerak

02 02 Barang bergerak

02 03 Barang persediaan

02 04 Jasa

- 02 05 Pengadaan aset tak berwujud
- PL 03 Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Negara
 - 03 01 Penyimpanan barang
 - 03 02 Pengiriman barang
 - 03 03 Pemeliharaan Barang
- PL 04 Penatausahaan Barang Milik Negara
 - 04 01 Pencatataan Barang Milik Negara
 - 04 02 Inventarisasi
 - 04 03 Opname fisik
 - 04 04 Rekonsiliasi data Barang Milik Negara
 - 04 05 Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)
 - 04 06 Laporan Barang Milik Negara
- PL 05 Penghapusan Barang Milik Negara
 - 05 01 Penghapusan Barang Milik Negara tanah/bangunan
 - 05 02 Penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan bangunan
 - 05 03 Penghapusan barang persediaan
 - 05 04 Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara
 - 05 05 Pemanfaatan Barang Milik Negara
 - 05 06 Penertiban Barang Milik Negara
- PL 06 Unit Layanan Pengadaan (ULP)
 - 06 01 ULP Kementerian
 - 06 02 ULP Unit Eselon I
 - 06 03 ULP Kantor Wilayah
 - 06 04 ULP Unit Pelaksana Teknis (UPT)

8. PR PERENCANAAN

- PR 01 Program dan Anggaran

- 01 01 Rencana Strategis
- 01 02 Rencana Kerja
- 01 03 RAPBN
- 01 04 Rencana Kerja dan Anggaran

- PR 02 Evaluasi
 - 02 01 Unit Utama
 - 02 02 Kantor Wilayah

- PR 03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

- PR 04 Pelaporan
 - 04 01 Laporan bulanan
 - 04 02 Laporan triwulan
 - 04 03 Laporan tengah tahunan
 - 04 04 Laporan tahunan
 - 04 05 Insidentil

- PR 05 Rapat Kerja
 - 05 01 Dengan DPR
 - 05 02 Tingkat Kementerian
 - 05 03 Tingkat Unit Utama (RAKERNIS)
 - 05 04 Tingkat Kantor Wilayah
 - 05 05 Rapat Pimpinan dan Rapat Staf

- PR 06 Sidang Kabinet
 - 06 01 Sidang kabinet terbatas
 - 06 02 Sidang kabinet paripurna

- PR 07 Bahan Pidato Presiden

9. PW PENGAWASAN

- PW 01 Program

- 01 01 Program pengawasan/pemeriksaan rutin
 - 01 02 Program pemeriksaan khusus
 - 01 03 Program monitoring/pemantauan
 - 01 04 Program pemeriksaan serentak atau pemeriksaan gabungan
- PW 02 Pelaksanaan
 - 02 01 Pemeriksaan rutin
 - 02 02 Pemeriksaan khusus
 - 02 03 Monitoring/pemantauan
 - 02 04 Pemeriksaan serentak atau pemeriksaan gabungan
- PW 03 Pelaporan
 - 03 01 Laporan hasil pemeriksaan rutin
 - 03 02 Laporan hasil pemeriksaan khusus
 - 03 03 Laporan hasil pemeriksaan monitoring/pemantauan
 - 03 04 Laporan hasil pemeriksaan serentak atau pemeriksaan gabungan
- PW 04 Tindak Lanjut
 - 04 01 Tindak lanjut hasil pemeriksaan rutin
 - 04 02 Tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus
 - 04 03 Tindak lanjut hasil monitoring/pemantauan
 - 04 04 Tindak lanjut pengaduan
 - 04 05 Tindak lanjut atensi dan telaahan
- 10. UM UMUM
 - UM 01 Ketatausahaan
 - 01 01 Persuratan dan kearsipan
 - 01 02 Penggandaan dan pencetakan
 - 01 03 Undangan
 - 01 04 Ucapan terima kasih, ucapan selamat

UM 02 Kerumahtanggaan

- 02 01 Penggunaan, perawatan ruang dan peralatan kantor
- 02 02 Penggunaan dan perawatan rumah negara
- 02 03 Penggunaan dan perawatan kendaraan dinas
- 02 04 Penggunaan dan perawatan fasilitas jaringan instalasi
- 02 05 Penggunaan dan perawatan barang elektronik serta mesin
- 02 06 Penggunaan dan perawatan gedung serta area kantor
- 02 07 Perjalanan Dinas (dalam/luar negeri)

UM 03 Keprotokolan

- 03 01 Penyelenggaraan upacara
- 03 02 Pelayanan tamu, acara kedinasan, jamuan dan ramah tamah
- 03 03 Daftar nama pejabat dan alamat

UM 04 Pengamanan

- 04 01 Pengamanan personil (VVIP/VIP)
- 04 02 Pengamanan lingkungan, fisik/instalasi
- 04 03 Pengamanan dokumen dan informasi rahasia

UM 05 Pembinaan Sikap dan Mental

- 05 01 Perayaan Hari Besar Nasional dan Hari Bhakti di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 05 02 Pelayanan sosial dan keagamaan

G. MASALAH SUBSTANTIF

1. PP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PP 01 Perancangan Peraturan Perundang-undangan

- 01 01 Perancangan

- 01 02 Penyusunan dan pembahasan
 - 01 03 Pengembangan dan pembinaan tenaga perancangan peraturan perundang-undangan
- 02 Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 02 01 Pemantapan Rancangan Undang-Undang /Rancangan Peraturan Pemerintah
 - 02 02 Analisa dan tanggapan Rancangan Undang-Undang/ Rancangan Peraturan Pemerintah
 - 02 03 Penyampaian Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah
- 03 Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama
 - 03 01 Pengundangan
 - 03 02 Publikasi
 - 03 03 Kerjasama
 - 03 04 Sistem informasi
- 04 Litigasi Peraturan Perundang-undangan
 - 04 01 Penyiapan dan pendampingan persidangan I
 - 04 02 Penyiapan dan pendampingan persidangan II
 - 04 03 Fasilitasi bahan dan analisa litigasi
- 05 Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
 - 05 01 Pemetaan dan publikasi
 - 05 02 Fasilitasi peraturan daerah wilayah I
 - 05 03 Fasilitasi peraturan daerah wilayah II
 - 05 04 Fasilitasi peraturan daerah wilayah III

2. AH ADMINISTRASI HUKUM UMUM

- AH 01 Badan Hukum
 - 01 01 Pengesahan badan hukum perseroan

- 01 02 Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan
- 01 03 Penerimaan pemberitahuan anggaran dasar perseroan
- 01 04 Pengesahan yayasan
- 01 05 Persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan
- 01 06 Persetujuan pemberitahuan anggaran dasar yayasan
- 01 07 Pengesahan perkumpulan
- 01 08 persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan
- 01 09 Persetujuan pemberitahuan anggaran dasar perkumpulan
- 01 10 Pembubaran, merger, likuidasi dan pembatalan

AH 02 Notariat

- 02 01 Pengangkatan notaris
- 02 02 Pindah alamat notaris
- 02 03 Perpanjangan masa jabatan notaris
- 02 04 Pemberhentian notaris
- 02 05 Sertifikat cuti
- 02 06 Penunjukan pemegang protokol
- 02 07 Notaris pengganti
- 02 08 Narasumber pelatihan calon notaris
- 02 09 Perubahan nama, gelar dan cap stempel

AH 03 Hukum Perdata Umum

- 03 01 Legalisasi spesimen tanda tangan
- 03 02 Ganti nama
- 03 03 Advokat asing
- 03 04 Pendapat hukum
- 03 05 Penyelewengan hukum

AH 04 Wasiat

- 04 01 Surat keterangan wasiat

- 04 02 Laporan bulanan wasiat
- 04 03 Pendaftaran kurator dan pengurus
- 04 04 Daftar Harta Peninggalan (*Boedel op wezig*)
- 04 05 Ijin Jual *Boedel*, persetujuan, penelitian dan penelaahan

- AH 05 Pendaftaran Fidusia
 - 05 01 Pendaftaran jaminan fidusia
 - 05 02 Perubahan
 - 05 03 Penghapusan / pencoretan
 - 05 04 Sertifikat pengganti

- AH 06 Harta Peninggalan
 - 06 01 Pendaftaran wasiat
 - 06 02 Perwalian pengawas
 - 06 03 Pengampu pengawas
 - 06 04 Pengampu anak dalam kandungan
 - 06 05 Pengampu harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (*Onbeheerde Nalatenschap*).
 - 06 06 Kurator dalam kepailitan
 - 06 07 Wali sementara
 - 06 08 Pengurus harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (*Afwezigheid*)
 - 06 09 Surat keterangan hak waris
 - 06 10 Transfer dana

- AH 07 Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi
 - 07 01 Pendapat hukum tentang pidana
 - 07 02 Peristiwa hukum

- AH 08 Pemantauan dan Evaluasi Hukum Pidana
 - 08 01 Pemberian pendapat Hukum Pidana Umum
 - 08 02 Pemberian pendapat Hukum Pidana Khusus

AH 09 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- 09 01 Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 09 02 Perpindahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 09 03 Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 09 04 Telaahan dan evaluasi

AH 10 Hukum Tata Negara

- 10 01 Kewarganegaraan
- 10 02 Pewarganegaraan
- 10 03 Bukti kewarganegaraan

AH 11 Partai Politik

- 11 01 Pendaftaran
- 11 02 Pembubaran
- 11 03 Sengketa

AH 12 Hukum Internasional dan Otoritas Pusat

- 12 01 Otoritas pusat
- 12 02 Hukum ekonomi, perdata dan lembaga internasional
- 12 03 Hukum laut, udara, dan lingkungan
- 12 04 Hukum humaniter
- 12 05 Perjanjian internasional
- 12 06 Ratifikasi
- 12 07 Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik

AH 13 Sidik Jari / Daktiloskopi

- 13 01 Dokumentasi dan arsip teraan
- 13 02 Perumusan dan identifikasi sidik jari
- 13 03 Data dan informasi sidik jari

3. PK PEMASYARAKATAN

PK 01 LAPAS / RUTAN / BAPAS

- 01 01 Registrasi
- 01 01 01 Tahanan
- 01 01 02 Narapidana
- 01 01 03 Anak Didik
- 01 01 04 Klien Pemasyarakatan
- 01 01 05 Titipan

PK 01 02 Statistik

- 01 02 01 Tahanan
- 01 02 02 Narapidana
- 01 02 03 Anak Didik
- 01 02 04 Klien Pemasyarakatan
- 01 02 05 Titipan

PK 01 03 Sidik Jari

- 01 03 01 Tahanan
- 01 03 02 Narapidana
- 01 03 03 Anak Didik
- 01 03 04 Klien Pemasyarakatan
- 01 03 05 Titipan

PK 01 04 Keamanan

- 01 04 01 Tata Tertib dalam lapas / rutan
- 01 04 02 Penjagaan / pengamanan
- 01 04 03 Kasus napi / tahanan / klien / anak didik

	01	04	04	Tenaga bantu keamanan
	01	04	05	Pengamanan pinjam tahanan
	01	04	06	Pengaduan
PK	01	05		Bimbingan Kemasyarakatan
	01	05	01	Admisi Orientasi
	01	05	02	Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)
	01	05	03	Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)
	01	05	04	Asimilasi / cuti mengunjungi keluarga
	01	05	05	Pidana Bersyarat (PiB)
	01	05	06	Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB)
PK	01	05	07	Pendampingan Sidang Pengadilan Anak
	01	05	08	Keluarga Asuh / Anak Asuh
	01	05	09	Bimbingan Kerohanian
	01	05	10	Bimbingan Klien / Home Visit
	01	05	11	Bimbingan Penyuluhan / Konseling
	01	05	12	Bantuan / Penyuluhan Hukum
PK	01	06		Pembinaan
	01	06	01	Pendidikan umum/kejuruan
	01	06	02	Kesenian/Olah Raga/Rekreasi
	01	06	03	Pelatihan keterampilan
	01	06	04	Penempatan guru-guru/instruktur/pelatih
	01	06	05	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/kejar paket
	01	06	06	Bebas Peredaran Uang (BPU)
	01	06	07	Surat Menyurat Warga Binaan Pemasyarakatan/Tahanan
	01	06	08	Generasi muda Warga Binaan Pemasyarakatan/Tahanan

	01	06	09	Kepramukaan
	01	06	10	Bebas peredaran narkotika
	01	06	11	Bebas peredaran alat komunikasi
PK	01	07		Kesejahteraan dan Perawatan
	01	07	01	Kesehatan
	01	07	02	Makanan
PK	01	08		Kegiatan Kerja dan Tenaga Kerja
	01	08	01	Pengembangan kewirausahaan (ketrampilan/minat bakat)
	01	08	02	Tenaga kerja napi/Anak Didik/klien
	01	08	03	Kerjasama/Kemitraan
	01	08	04	Upah/Premi
PK	02			RUPBASAN
	02	01		Registrasi dan identifikasi
	02	01	01	Benda sitaan
	02	01	02	Barang rampasan
PK	02	02		Statistik dan pelaporan
	02	02	01	Benda sitaan
	02	02	02	Barang rampasan
PK	02	03		Keamanan dan pengawasan
	02	03	01	Tata tertib
	02	03	02	Penjagaan
	02	03	03	Kasus (pencurian, penggelapan dan penghilangan)

PK 02 04 Pemeliharaan dan perawatan

02 04 01 Benda sitaan

02 04 02 Barang rampasan

PK 02 05 Mutasi dan penghapusan

02 05 01 Benda sitaan

02 05 02 Barang rampasan

4. GR KEIMIGRASIAN

GR 01 Perizinan Keimigrasian

01 01 Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Doklan)

01 02 Pas lintas batas

01 03 Kedatangan dan keberangkatan WNI termasuk kartu
A / D (Arrival & Departure Card), Pax List dan Crew List.

01 04 Kedatangan dan keberangkatan WNA termasuk kartu
A / D (Arrival & Departure Card), Pax List dan Crew List

01 05 Fasilitas Keimigrasian antara lain ABTC dan *Smart Card*

01 06 Visa kunjungan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK)
atau *Visa On Arrival (VOA)*, Visa Tinggal Terbatas

01 07 Bebas Visa Kunjungan (BVK)

01 08 Tanda Masuk dan Tanda Keluar

01 09 Izin Tinggal Kunjungan (ITK)

01 10 Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

01 11 Izin Tinggal Tetap (ITAP)

01 12 Kemudahan khusus keimigrasian (Dahsuskim)

01 13 Alih status (konversi) izin tinggal termasuk
penolakannya

01 14 Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)

01 15 Pendaftaran orang asing

01 16 Pendistribusian Blanko Doklan dan Dokumen Keimigrasian
(DOKIM)

- 01 17 Pengembalian Blanko Doklan dan Dokumen Keimigrasian (DOKIM)
- 01 18 Rekomendasi untuk mendapatkan *Work and Holiday Visa*
- GR 02 Pengendalian Keimigrasian
 - 02 01 Pemantauan, penyidikan, termasuk Surat Perintah dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
 - 02 02 Deportasi dan penolakan Tanda masuk
 - 02 03 Pendetensian
 - 02 04 Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal
 - 02 05 Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
 - 02 06 Pencegahan dan penangkalan
 - 02 07 Imigran ilegal
 - 02 08 Pencabutan, pembatalan, penahanan Doklan dan DOKIM termasuk siar paspor yang dibatalkan
- GR 03 Pengawasan Keimigrasian dan Intelijen Keimigrasian
 - 03 01 Pengawasan terhadap WNI
 - 03 02 Pengawasan terhadap WNA (Tim Pengawasan Orang Asing)
 - 03 03 Operasi Intelijen Keimigrasian (pengumpulan Bahan Keterangan/Pulbaket; Operasi Kewilayahan; Penggalangan)
 - 03 04 Pengamanan Keimigrasian (Pengamanan Perizinan Keimigrasian; Pengamanan Personil, Material dan Dokumen; Pengamanan Kantor dan Instalasi Vital)
 - 03 05 Kerjasama Intelijen Keimigrasian
 - 03 06 Produk Intelijen Keimigrasian
- GR 04 Informasi Keimigrasian
 - 04 01 Lintas informasi internal termasuk tukar menukar informasi dan pelaporan kegiatan keimigrasian
 - 04 02 Lintas informasi external termasuk pertukaran informasi dengan institusi di luar imigrasi
- 5. HI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
 - HI 01 Hak Cipta

- 01 01 Permohonan
- 01 02 Penolakan
- 01 03 Penghapusan, pembatalan, penarikan
- 01 04 Lisensi, pengalihan hak, perubahan nama dan alamat
- 01 05 Pelanggaran / penegakan hukum di bidang hak cipta
- 01 06 Pendapat hukum di bidang hak cipta
- 01 07 Surat tanda pendaftaran ciptaan, petikan, ralat/
perbaikan
- 01 08 Dewan Hak Cipta

HI 02 Desain Industri

- 02 01 Permohonan termasuk pemeriksaan, publikasi dan
oposisi
- 02 02 Penolakan
- 02 03 Penghapusan, pembatalan dan penarikan
- 02 04 Lisensi, pengalihan hak, perubahan nama dan alamat
- 02 05 Pelanggaran / penegakan hukum desain industri
- 02 06 Pendapat hukum bidang desain industri
- 02 07 Sertifikat, petikan, ralat/perbaikan

HI 03 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

- 03 01 Permohonan, termasuk pemeriksaan, publikasi dan
oposisi
- 03 02 Penolakan
- 03 03 Penghapusan, pembatalan dan penarikan
- 03 04 Lisensi, pengalihan hak, perubahan nama dan alamat
- 03 05 Pelanggaran/penegakan hukum di bidang DTLST
- 03 06 Pendapat hukum bidang DTLST
- 03 07 Sertifikat, petikan dan ralat/perbaikan

HI 04 Rahasia Dagang

- 04 01 Pencatatan Lisensi Rahasia Dagang
- 04 02 Pengalihan hak, perubahan nama dan alamat
- 04 03 Pendapat hukum di bidang Rahasia Dagang
- 04 04 Lembaga Manajemen Kolektif

HI 05 Paten

- 05 01 Permohonan, pemeriksaan formalitas, publikasi dan oposisi
- 05 02 Pemeriksaan substantif (tahap awal, tahap lanjutan, tahap akhir, termasuk penolakan, pemberian paten/ granted, dan dianggap ditarik kembali)
- 05 03 Penghapusan, pembatalan, penarikan oleh pemohon
- 05 04 Lisensi, pengalihan hak, perubahan nama dan alamat
- 05 05 Pelanggaran / penegakan hukum bidang paten
- 05 06 Pendapat hukum bidang paten
- 05 07 Sertifikat, petikan, ralat/perbaikan

HI 06 Merek

- 06 01 Permohonan, termasuk pemeriksaan, publikasi dan oposisi
- 06 02 Penolakan
- 06 03 Penghapusan, pembatalan dan penarikan
- 06 04 Lisensi, pengalihan hak, perubahan nama dan alamat
- 06 05 Pelanggaran / penegakan hukum di bidang merek
- 06 06 Pendapat hukum bidang merek
- 06 07 Sertifikat, petikan, ralat/perbaikan
- 06 08 Indikasi Geografis

HI 07 Penyidikan

- 07 01 Pengaduan
- 07 02 Administrasi Penyidikan

- 07 03 Penindakan (ada 15 klasifikasi / terlampir)
 - 01 Laporan Kejadian
 - 02 Surat Perintah Tugas
 - 03 Surat Perintah Penyidikan
 - 04 Surat Perintah Penyitaan
 - 05 Surat Perintah Penggeledahan
 - 06 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
 - 07 Surat Panggilan
 - 08 Surat Permintaan Ahli
 - 09 Surat Permintaan Bantuan Penggeledahan/Penyitaan
 - 10 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti
 - 11 Surat Pengembalian Barang Bukti
 - 12 Surat Permintaan Ijin Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan
 - 13 Surat Permintaan Ijin Penggeledahan Kepada Ketua Pengadilan
 - 14 Surat Pengiriman Berkas Perkara
 - 15 Surat Pengiriman TSK dan BB
- 07 04 Pemantauan
- 07 05 Evaluasi

HI 08 Komisi Banding

- 08 01 Desain Industri
- 08 02 Paten
- 08 03 Merek

6. HA HAK ASASI MANUSIA

HA 01 Pelayanan Komunikasi Masyarakat

- 01 01 Koordinasi, perumusan, rekomendasi perlindungan, pemenuhan Hak-Hak Sipil dan Politik

- 01 02 Koordinasi, perumusan, rekomendasi perlindungan, pemenuhan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- HA 02 Kerjasama Hak Asasi Manusia
 - 02 01 Legislasi Hak Asasi Manusia (Draft RUU, Telaahan legislasi, dll.)
 - 02 02 Harmonisasi Hak Asasi Manusia (RUU, Evaluasi/ Revisi UU, dll.)
 - 02 03 Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional (Naskah Akademik, Ratifikasi Kovenan/Konvensi, dll.)
- HA 03 Diseminasi Hak Asasi Manusia
 - 03 01 Metodologi Diseminasi Hak Asasi Manusia
 - 03 02 Pembudayaan kesadaran Hak Asasi Manusia bagi aparatur
 - 03 03 Pembudayaan kesadaran Hak Asasi Manusia bagi masyarakat
 - 03 04 Pengembangan dan Bimbingan Teknis bagi penyuluh Hak Asasi Manusia
- HA 04 Penguatan Hak Asasi Manusia
 - 04 01 Kurikulum Hak Asasi Manusia
 - 04 02 Modul Hak Asasi Manusia
 - 04 03 Bahan ajar dan bacaan
 - 04 04 Pembinaan Hak Asasi Manusia bagi fasilitator
 - 04 05 Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi aparatur
 - 04 06 Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat
- HA 05 Evaluasi dan Pelaporan Implementasi Hak Asasi Manusia
 - 05 01 Evaluasi implementasi Hak Asasi Manusia
 - 05 02 Laporan Implementasi Hak Asasi Manusia

7. HN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

HN 01 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional

- 01 01 Prolegnas
- 01 02 Prolegda
- 01 03 Naskah akademis
- 01 04 Kompilasi
- 01 05 Peta permasalahan hukum
- 01 06 Analisa dan evaluasi
- 01 07 Anotasi yurisprudensi
- 01 08 Penyusunan kerangka ilmiah
- 01 09 Kompendium / pendapat ahli hukum
- 01 10 Harmonisasi
- 01 11 PPHN
- 01 12 Kerjasama hukum

HN 02 Dokumentasi dan Informasi Hukum

- 02 01 Pengembangan teknis dokumentasi hukum
- 02 02 Kamus hukum dan pembakuan istilah hukum
- 02 03 Penyebarluasan hasil-hasil pembinaan hukum nasional

HN 03 Penyuluhan Hukum

- 03 01 Penyuluhan hukum langsung/terpadu
- 03 02 Penyuluhan hukum tidak langsung (melalui TVRI, RRI, Media Cetak / Pers, Spanduk, foto, dll)
- 03 03 Konsultasi hukum dan bantuan hukum
- 03 04 Evaluasi kegiatan penyuluhan hukum pusat dan daerah
- 03 05 Kadarkum

8. LT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

LT 01 Penelitian

- 01 01 Penelitian Hak-Hak Sipil dan Politik
- 01 02 Penelitian Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 01 03 Penelitian Transformasi Konflik
- 01 04 Penelitian Hak-Hak Kelompok Khusus
- 01 05 Penelitian Sistem Hukum Nasional
- 01 06 Hasil penulisan karya ilmiah

LT 02 Pengkajian

- 02 01 Pengkajian Sistem Hukum Nasional
- 02 02 Pengkajian kebijakan

LT 03 Pengembangan

- 03 01 Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik
- 03 02 Pengembangan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
- 03 03 Pengembangan Transformasi Konflik
- 03 04 Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus
- 03 05 Pengembangan Sistem Hukum Nasional
- 03 06 Inventarisasi masalah aktual di bidang hukum

LT 04 Data dan Informasi

- 04 01 Pemetaan Hak Asasi Manusia
- 04 02 Data dan Statistik Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 04 03 Kumpulan Instrumen Hak Asasi Manusia secara elektronik (CD)
- 04 04 Direktori Lembaga di Bidang Hak Asasi Manusia
- 04 05 Jurnal Penelitian (Jurnal Hak Asasi Manusia dan Jurnal Hukum Lainnya)
- 04 06 Panduan dan Kamus Hak Asasi Manusia
- 04 07 Inventarisasi masalah aktual di bidang Hak Asasi Manusia

LT 05 Evaluasi

- 05 01 Evaluasi hasil penelitian
- 05 02 Analisis dan Evaluasi permasalahan Hak Asasi Manusia
- 05 03 Analisis dan Evaluasi Administrasi dan Kebijakan Hukum

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

